BAB III

OBJEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Letak Geografis Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50 - 7°50 LS dan 104°48 - 104°48 BT dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan Banten serta DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia di Selatan dn Selat Sunda di barat. Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda), luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 Km2 atau 4.435.461 Ha.

Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah.Dengan ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Provinsi Banten, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 34.816,96 (Data berdasarkan Survei Sosial/Ekonomi 2005).

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Untuk lebih jelas, letak geografis Kota Bandung dapat dilihat pada gambar

Gambar 3.1
Peta Provinsi Jawa Barat



Sumber: www.jabar.go.id/2010

Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 . 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.

Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan Propinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian.

Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan tediri dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon.

Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 592 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

.

3.1.2 Sejarah Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Saat ini terdapat wacana untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, dengan memperhatikan aspek historis wilayah ini.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunkan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara.

Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan sunda beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor).

Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cerbon (kelak menjadi Kota Cirebon) lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.

Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja, raja Sunda saat itu, meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa, kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Sunda-Portugis, yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut *padrão* di tepi Ci Liwung.

Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan, menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.

Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda, dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan (Jawa Barat bagian tenggara) jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan *Bestuurshervormingwet* tahun

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah *Soendalanden* (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.

Provinsi Jawa Barat, sejak berdirinya sampai sekarang telah dipimpin oleh 12 orang Gubernur, yaitu : M Sutardjo Kartohadi (1945-1946), Mr.Datuk Djamin (1946), M.Sewaka (1946-1952), R.Muhamad Sanusi Hardjadinata (1952-1956), R.Ipik Gandamana (1956-1960), H. Mashidu (1960-1970), Solihin GP (1970-1975), H. Aang Kunaefi (1975-11985), HR.Yogie SM (1985-1993), R.Nuriana (1993-2003), H.Danny Setiawan (2003 – 2008) dan H. Ahmad Haryawan (2008-sekarang)

3.1.3 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Provinsi Jawa Barat mempunyai visi dan misi untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Visi Provinsi Jawa Barat adalah Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan SejahteraUntuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis *e-government*, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.

Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Berikut Misi Provinsi Jawa Barat:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal;
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi

Berdasarkan Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat merealisasikan keinginan, harapan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama masyarakat. Misi Provinsi Jawa Barat dapat disebabkan adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakan roda pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi Provinsi Jawa Barat tersebut di bidang perhubungan yang melingkup:

1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa;
2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);
5. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

3.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

3.2.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Pada Umumnya keberadaan sebuah organisasi tidak akan selalu tetap, melainkan selalu dinamis/berubah sesuai tuntutan perubahan jaman, baik dalam hal bentuk / strukturnya, orang yang duduk didalamnya, sampai kedalam hal misi dan visinya. Itu semua dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian merupakan sebuah Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk sebuah organisasi yang dinamis, karena keberadaannya merupakan hasil perubahan / likuidasi dari 2 (dua) organisasi yang menangani masalah transportasi di Jawa Barat, yaitu organisasi / instansi vertikal yang bernama Kantor Wilayah X Departemen Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan organisasi / instansi Daerah yang bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Masing-masing institusi tersebut dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan dan akhirnya dengan diberlakukannya otonomi Daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999, Instansi vertikal Kantor Wilayah X Departemen Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Instansi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di likuidasi menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat yang kemudian Strukturnya disempurnakan dengan Perda No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan perkembangan isu politik dan pemerintahan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang isinya berupa panduan pembentukan organisasi perangkat daerah bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang disesuaikan dengan potensi dan beban kerja yang dimiliki masing-masing daerah. Oleh Karena itu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ikut berubah dengan mengacu pada peraturan tersebut dan khusus Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan mulai berlaku efektif per Januari 2009.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

3.2.2 Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Jawa Barat

3.1.3.1Visi Dinas Perhubungan Jawa Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan aktivitasnya tidak terlepas dari visi dan misi yang diembannya. Visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah Terwujudnya Perhubungan Terpadu sebagai Pendorong Utama Pembangunan Jawa Barat. Prima dalam pelayanan menuju Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bersama seluruh elemen masyarakat Provinsi Jawa Barat.

3.2.3.1 Misi Dinas Perhubungan Jawa Barat

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan penyelenggaraan perhubungan melalui konsolidasi dan penataan ketatalaksanaan sejalan dengan otonomi daerah.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

2. Memenuhi kebutuhan sarana , prasarana dan fasilitas perhubungan yang berdimensi kelancaran dan keselamatan
3. Mengembangkan sistem perhubungan terpadu yang mampu mendukung percepatan pembangunan ekonomi berskala lokal, regional dan nasional melalui pembangunan sistem informasi manajemen perhubungan dan pemanfaatan kemajuan IPTEK, serta meningkatkan profesionalisme SDM Perhubungan.

3.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 46 tahun 2001, Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok "Merumuskan Kebijaksanaan Organisasi bidang Perhubungan yang merupakan sebagian kewenangan Desentralisasi Propinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan ".

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 46 tahun 2001, Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

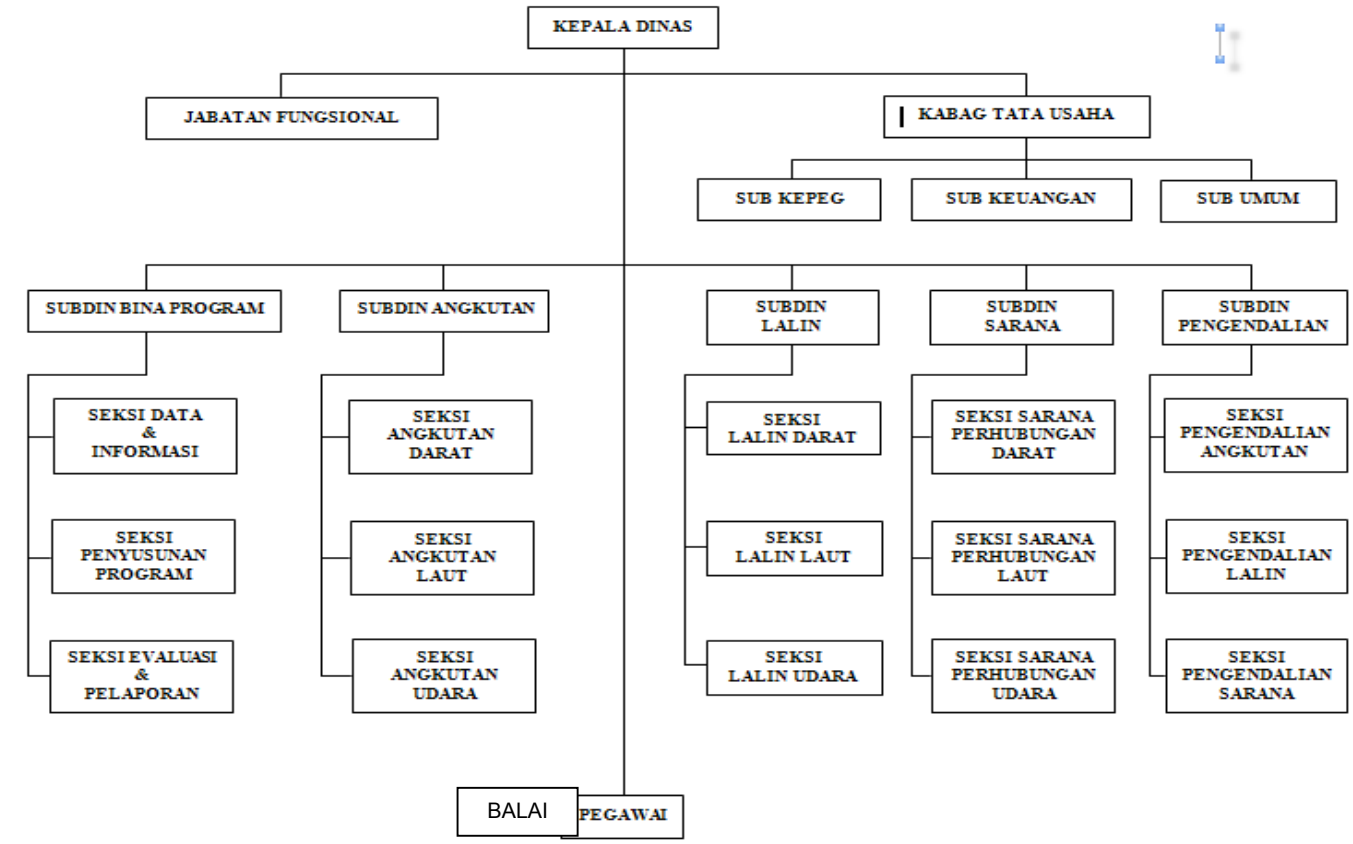
1. Perumusan kebijakan operasional bidang perhubungan ;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan ;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan meliputi ; Program, Angkutan, Lalu Lintas, Sarana dan Pengendalian ;

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

4. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

3.2.6 Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Gambar 3.2
Struktur Birokrasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat



JUMLAH PEGAWAI
JUMLAH TOTAL : 559 Orang
TERDIRI DARI :
- **PEGAWAI DEFINITIF : 495 Orang**
- **TENAGA KERJA KONTRAK : 64 Orang**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, tahun 2008.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Berdasarkan Pasal 4 huruf (i) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
   a) Sub Bagian Kepegawaian ;
   b) Sub Bagian Keuangan ;
   c) Sub Bagian Umum ;
3. Sub Dinas Bina Program, membawahkan :Seksi Data dan Informasi ;
   a) Seksi Penyusunan Program ;
   b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
4. Sub Dinas Angkutan, membawahkan :
   a) Seksi Angkutan Darat ;
   b) Seksi Angkutan Laut ;
   c) Seksi Angkutan Udara ;
5. Sub Dinas Lalu Lintas, membawahkan :
   a) Seksi Lalu Lintas Darat ;Seksi Lalu Lintas Laut ;
   b) Seksi Lalu Lintas Udara ;
6. Sub Dinas Pengendalian, membawahkan :
   a) Seksi Pengendalian Angkutan ;
   b) Seksi Pengendalian Sarana ;
   c) Seksi Pengendalian Lalu Lintas ;
7. Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan :

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

a) Seksi Sarana Perhubungan Darat ;

b) Seksi Sarana Perhubungan Laut ;

c) Seksi Sarana Perhubungan Udara ;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Khusus Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf (i) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, dimana dalam ketentuan tersebut Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat memiliki 5 (lima) unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu:

1. Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) dengan struktur sebagai berikut :

1) Kepala Balai

2) Sub Bagian Tata Usaha

3) Seksi Sarana dan Prasarana

4) Seksi Tata Operasional

5) Seksi Keselamatan

6) Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat)

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

2. Balai Pengelolaan Bandar Udara, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
    1) Kepala Balai
    2) Sub Bagian Tata Usaha
    3) Seksi Sarana dan Prasarana
    4) Seksi Tata Operasional
    5) Instalasi (Bandara Nusawiru Ciamis)
    6) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Balai Pengawasan Spektrum dan Frekuensi Radio, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
    1) Kepala Balai
    2) Sub Bagian Tata Usaha
    3) Seksi Identifikasi
    4) Seksi Penertiban
    5) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah I (Bogor Purwakarta) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
    1) Kepala Balai
    2) Sub Bagian Tata Usaha
    3) Seksi Pelayanan
    4) Seksi Pemeriksaan
    5) Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat)
    6) Kelompok Jabatan Fungsional

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

5. Balai Pelayanan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Wilayah II (Cirebon – Priangan) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

   1) Kepala Balai
   2) Sub Bagian Tata Usaha
   3) Seksi Pelayanan
   4) Seksi Pemeriksaan
   5) Instalasi (tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat)
   6) Kelompok Jabatan Fungsional

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com